



LKJIP 2024

BPBD KOTA BONTANG

Disusun:

Tim Penyusun SAKIP

BPBD Kota Bontang



(0548) 3036542



082252278609



Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Bontang



Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 113 Rt. 36,
Kelurahan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya lah, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pelaporan dari pencapaian kinerja yang terukur, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus selaras dengan indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kerja, dan rencana aksi serta rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan tahunan yang menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi dan indikator kinerja kegiatan/program, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja secara keseluruhan, serta merupakan pembandingan capaian kinerja tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan merencanakan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pertanggungjawaban, manajemen sumber daya aparatur dan aset, khususnya dalam penanggulangan bencana di Kota Bontang.

Bontang, 11 Maret 2025
Kepala Pelaksana,



H. Usman HM., ST, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19670615 200312 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2024 merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat akuntabilitas kinerja yang disusun sebagai pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

Untuk mengukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilakukan pengukuran melalui instrumen indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian kinerja indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan secara optimal yaitu sebesar 100%, indikator kinerja Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % dan telah sesuai target yang ditentukan, yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hasil

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 69.35 (Baik) dengan kategori B, hal ini sudah tentu akan menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi kedepan untuk.

Sedangkan dalam melaksanakan kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerap anggaran sebesar 93,49%.

Dari analisis atas capaian kinerja tersebut beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna meningkatkan capaian target kinerja antara lain:

- a. Meningkatkan dan mendorong kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Meningkatkan dan mendorong kegiatan di bidang kedaruaratan dan logistik;
- c. Meningkatkan dan mendorong kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana serta kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan sumber daya aparatur Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dapat menyusun strategi perencanaan kinerja yang lebih baik agar pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	1
Daftar Tabel.....	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	4
B. PERMASALAHAN UTAMA	5
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA	7
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
B. POHON KINERJA	14
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	20
E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2024	24
F. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	25
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	27
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	29
BAB IV	64
PENUTUP.....	64

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Rekap Data Bencana Kota Bontang Tahun 2024.....	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	9
Tabel 1. 5 Data Aset per 31 Desember 2024	10
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja.....	13
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2. 3 Target Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 2. 5 Rencana Kerja Tahunan tahun 2024	22
Tabel 2. 6 Rincian Anggaran dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024.....	24
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	26
Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	31
Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024	32
Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)	36
Tabel 3. 6 Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	38
Tabel 3. 7 Analisis Dukungan Anggaran	38
Tabel 3. 8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu	43
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)	44
Tabel 3. 11 Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	46



Tabel 3. 12 Analisis Dukungan Anggaran	47
Tabel 3. 13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3. 14 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)	52
Tabel 3. 16 Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel 3. 17 Pagu dan Realisasi Program Tahun 2024	56
Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2024.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 dan diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan Klasifikasi tipe B. Seiring waktu dengan perubahan nomenklatur dan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang berubah menjadi tipe A. Sesuai peraturan tersebut berikut adalah uraian tugas dan fungsi BPBD Kota Bontang:

1. Unsur Pelaksana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian;
2. Pengomandoan; dan
3. Pelaksana.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan mandat, misi dan nilai, kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal akan dapat kita identifikasi persoalan kritis organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki aspek strategis :

1. Ketidaktahuan masyarakat akan potensi bencana yang senantiasa mengancam disekitarnya.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya bencana.
3. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dalam penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun permasalahan pada pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- ✚ Belum optimalnya sinergitas dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana;
- ✚ Masih terbatasnya regulasi dan forum-forum terkait kebencanaan;
- ✚ Kurangnya antusiasme dan kesadaran OPD terkait dalam melengkapi data pendukung IKD (Indeks Ketahanan Daerah);

- + Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana;
- + Tingkat pemahaman relawan dalam hal kebencanaan masih rendah;
- + Belum optimalnya penyebaran informasi, pemantauan dan pelatihan dalam penanggulangan bencana;
- + Sosialisasi mitigasi bencana alam dan sosial belum tersebar merata di daerah rawan bencana;
- + Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik:

- + Terbatasnya jumlah personil yang menangani kebencanaan khususnya anggota BPBD;
- + Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang alat-alat rescue;
- + Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menganalisa kebutuhan logistik terutama ketika terjadi bencana;
- + Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) tingkat Kota.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

- + Belum adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terakomodir didalam rencana strategis BPBD;
- + Belum terbentuknya Tim JITUPASNA tingkat Kota;
- + Masih minimnya regulasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Tabel 1. 1 Rekap Data Bencana Kota Bontang Tahun 2024
(update s/d 31 Desember 2024)

No .	PENGGOLONGAN JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1.	Banjir	3 kejadian
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	40 kejadian
3.	Kebakaran Pemukiman	13 kejadian

4.	Tanah Longsor	1 kejadian
5.	Angin Puting Beliung	0 kejadian
6.	Evakuasi Jenazah	0 kejadian
7.	Evakuasi	0 kejadian
8.	Pencarian Orang Hilang	5 kejadian
9.	Kebencanaan Lain2	1 kejadian
10.	Lainnya	0 kejadian

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah instansi eselon II (dua) dimana untuk Kepala Badan secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Pelaksana
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

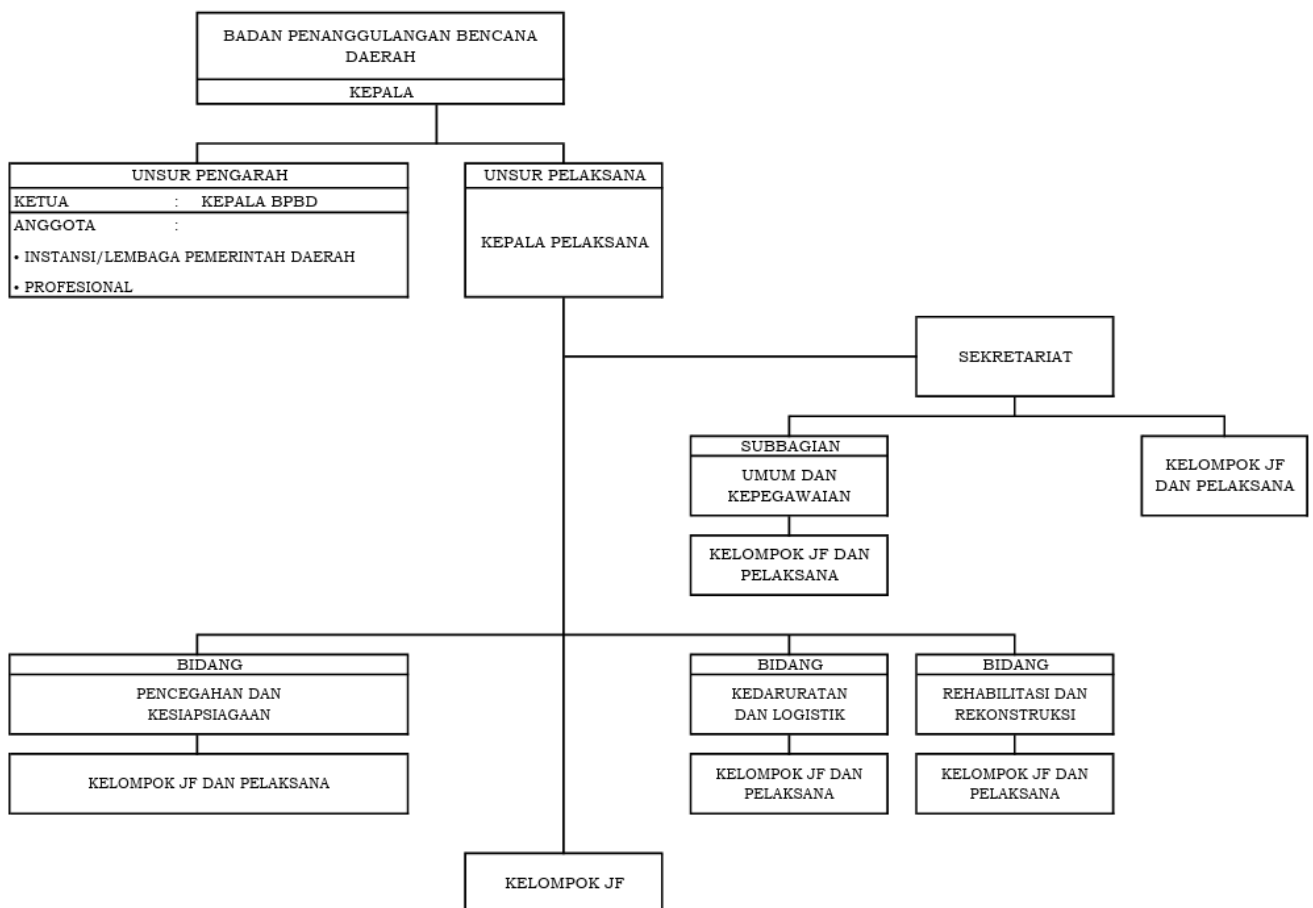
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BONTANG

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Berikut ini rincian dari sumber daya tersebut:

1. KEPEGAWAIAN

Pada tahun 2024, jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebanyak 51 (empat puluh satu) yang meliputi 18 orang berstatus PNS, dan 24 orang berstatus PPPK. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
1.	ASN	47	3
2.	Non ASN	3	2
Jumlah		50	5

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol/ Ruang	Jumlah	Jumlah Seluruhnya
1	IV/ b	1	1
2	IV/ a	4	4
3	III/ d III/ a	1 8	9
4	II/ d II/ b II/a	2 1 29	32
6	Non ASN	4	4
JUMLAH			51

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
ASN	2	7	-	36	1	47
NON ASN	-	1	-	4	-	4
JUMLAH	2	8	-	40	1	51

Berdasarkan analisis beban kerja menunjukkan bahwa jumlah SDM yang dimiliki belum mencukupi. Namun hal itu tidak menghalangi dalam pelaksanaan tugas. Dengan memaksimalkan jumlah dan kompetensi personil yang ada, pelaksanaan penanggulangan bencana dapat teratasi. Kemudian secara rutin mengirimkan pegawai maupun personil lapangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi, BNPB maupun instansi teknis lainnya.

2. ASET PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Data Aset sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Data Aset per 31 Desember 2024

LAP. ASET TAHUN 2024			
No	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	Water Treatment	1	
2	Mesin Pompa Karhutla	1	
3	Mesin Pompa Karhutla Ringan	1	
4	Pompa Punggung Pemadam Kebakaran	20	
5	Mesin Pompa Jinjing	2	
6	Mesin Pompa Induk	1	



7	Nozzle Gambut	2	
8	Cabang Selang (Y Connector Breecing Diving)	2	
9	Tanks (Tabung Selam)	4	
10	Dive Lights (Senter Selam)	2	
11	Kompresor Selam	1	
12	Tali Kamantel Static	2	
13	Seat Harness	4	
14	Prusik	1	
15	Jummar (Grigri)	3	
16	Carabiner Non Screw	10	
17	Webbing (Footape)	2	
18	Pick Up Double Cabin	1	Mobil Operasional KT 8733 Q
19	Mobil Pick Up Double Cabin	1	Mobil Operasional KT 8714 Q (DBHDR)
20	Pick Up Double Cabin	1	Mobil Operasional KT 8731 Q
21	Pick Up Hilux Double Cabin	1	Mobil Operasional KT 8104 D
22	Pick Up Single Cabin	1	Mobil Operasional KT 8732 Q (DBHDR)
23	Pick Up All New Hilux D-CAB E M/T	1	Mobil Operasional KT 8006 Q
24	Mobil Pick Up Double Cabin	1	Mobil Operasional KT 8713 Q (DBHDR)
25	Mobil Pick Up Maxi	1	Mobil Operasional L-300
26	Sepeda Motor Roda 2 Trail	35	Motor Trail
27	Mobil Tangki Air	1	Mobil Tangki KT 8719 Q (HIBAH BNPB)
28	Mobil Rescue	1	Mobil Rescue KT 8720 Q (HIBAH BNPB)
29	Speed Boad	4	
30	Kapal motor Ambulance Air	1	
31	Perahu Karet	11	
32	Perahu Lipat (3,85m)	2	



33	Mesin Potong Kayu Besar	1	
34	Mesin Gergaji	1	
35	Mesin Potong Kayu Kecil	1	
36	Alat GPS	2	
37	Velbed/Tempat Tidur Besi	25	
38	Tenda Kebencanaan	17	
39	Radio + Power Supply + Antena + Kabel	2	
40	Senter HID	2	
41	Sepatu Pemadam	24	
42	Masker Double Filter	24	
43	Tabung Apar	10	
44	Pompa Apung	1	
45	flexible Tank 1500 galon	1	
46	Radio Reg	1	
47	Repiter	1	
48	GPS MAP	1	
49	Handy Talky (HT)	67	
50	Radio SSB	1	
51	Radio RIG	1	
52	Radio Tuning	1	
53	Alat Tes Kualitas Air / P.H Meter	1	
54	Alat Selam	3	
55	Tabung Selam	7	
56	Breathing Aparatus	6	
57	GPS	3	
58	Regulator	2	
59	Regulator	1	
60	B C D	2	
61	Generator Set	2	
62	Teropong	1	
63	Kompresor selam	1	
64	Baju Pemadam	24	
65	Helmet Pemadam	24	
66	Pelampung Lintasan (Fender)	12	
JUMLAH		395	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

A. RENCANA STRATEGIS

Keselarasan dan keterkaitan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021 – 2026, yaitu merujuk pada visi kota bontang **“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung visi misi Pemerintah Kota Bontang yaitu pada misi II: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. Pada tujuan 2 yaitu Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh dan indikator sasaran tingkat kota yaitu Indeks kualitas perkotaan

Guna mendukung terwujudnya visi dan misi tingkat kota maka Badan penanggulangan bencana daerah menyusun tujuan dan sasaran dalam kerangka Rencana Strategis. Adapun kerangka tersebut tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

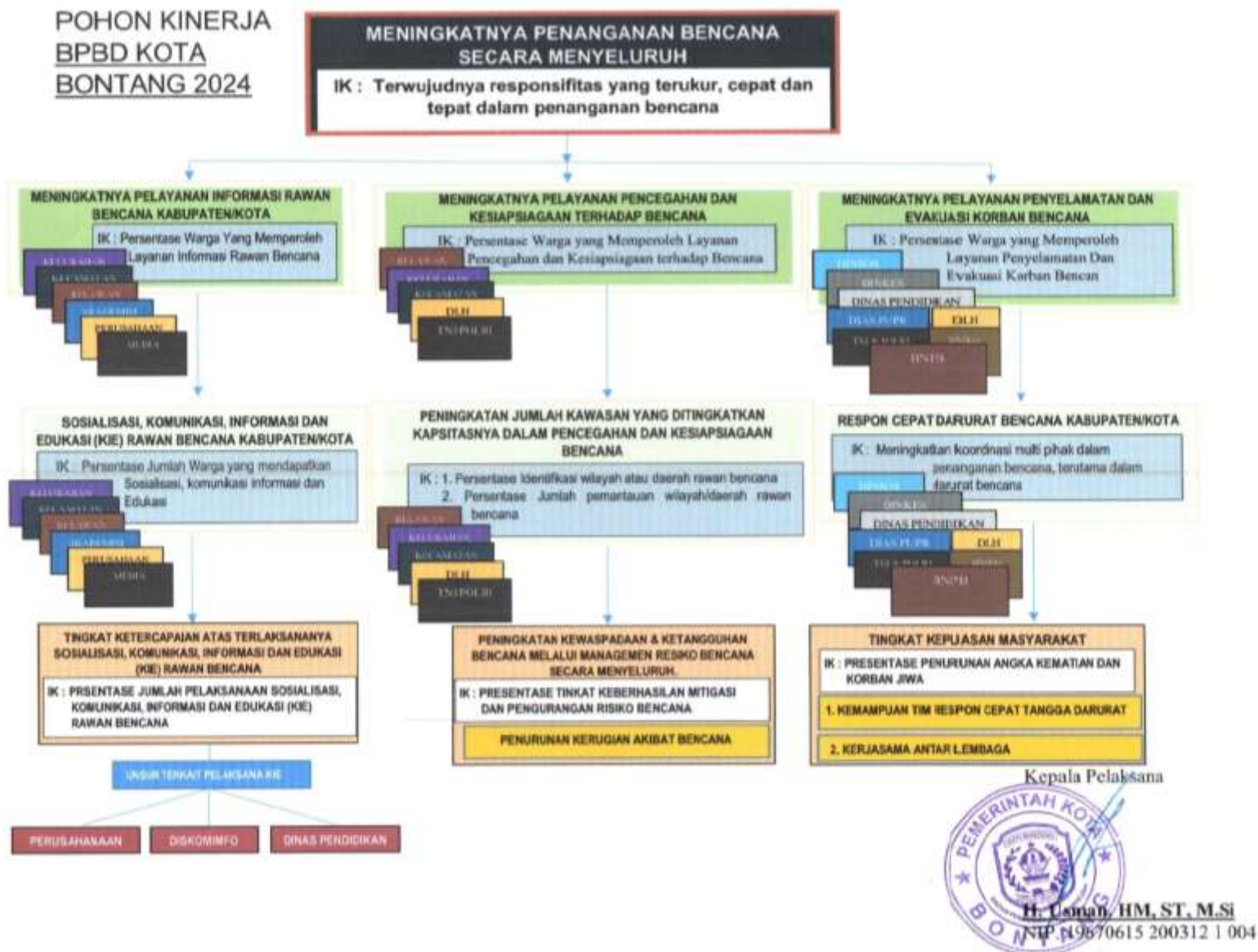
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2024	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Tingkat Pelayanan penanggulangan bencana	Terwujudnya responsifitas penanggulangan bencana yang terukur, cepat dan tepat	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
				Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
				Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Akuntabilitas Pelayan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB

B. POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi oerorganisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Fungsi pohon kinerja adalah untuk

mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebagai berikut:



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bontang Nomor : 30 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

No	Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Responsifitas yang terukur, cepat dan tepat	1. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	Jumlah Orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang berhak mendapat	Permendagri 101/2018 tentang SPM sub urusan bencana Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

	dalam penanganan bencana			layanan di kali 100%		
		2. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	Jumlah Orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang berhak mendapat layanan di kali 100%	Permendagri 101/2018 tentang SPM sub urusan bencana Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		3. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	Jumlah Orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang berhak mendapat layanan di kali 100%	Permendagri 101/2018 tentang SPM sub urusan bencana Kabupaten/Kota	Bidang Kedaruratan dan Logistik

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra bagi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tupoksinya. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 tampak pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3 Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B

Dari target yang telah dibuat maka disusunlah rencana kerja tahunan tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2. 4 Rencana Kerja Tahunan tahun 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Terwujudnya reponsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.773.019.880
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1.009.998.431



		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1945 Orang	1.586.278.164
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	45 Kawasan	176.743.285
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	74,951,210
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket	5,550,000



						Bencana Kabupaten/Kota			
									7,332,927,974
			100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	4,707,166,055
			100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	199,875,050
			100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,272,385
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	60,786,928



						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99,970,457
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28,795,620
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	249,681,480
			100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	5,100,000



						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156,300,000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	972,896,000
			100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	843,083,999

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2024

Penetapan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A. 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

1. Indikator Kinerja Awal yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang TA. 2024 sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Indikator Kinerja Perubahan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang TA. 2024 sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian Anggaran dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2024 menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rincian Anggaran dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	DPA (Murni)	DPA (Pergeseran)	DPA (Perubahan)
1	Belanja Pegawai	Rp 8.126.062.920	Rp 8.126.062.920	Rp 6.933.352.505
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.816.137.297	Rp 4.816.137.297	Rp 5.544.644.870
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 353.154.601	Rp 353.154.601	Rp 364.767.437
4	Belanja Modal Jalan dan Jaringan	Rp 89.206.000	Rp 89.206.000	Rp 89.206.000
	Total	Rp 8,374,989,379	Rp 8,374,989,379	Rp 12.477.997.375

F. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen penerima amanah (pimpinan instansi) dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah (pimpinan instansi yang lebih tinggi) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2021—2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024,

Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2024 antara Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang dengan Walikota Bontang:

1. Perjanjian Kinerja Awal tahun 2024

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya reponsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Prosentase	100%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase	15%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Prosentase	100%

2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	korban bencana		
		Nilai Sakip	Kategori	B

2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya reponsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Prosentase	100%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase	15%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kategori	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out come) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. NILAI HASIL EVALUASI LKjIP SEBELUMNYA

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **69,35** yang menunjukkan dalam kategori **B (Baik)**.

Nilai akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,65
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,14
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,79
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B (Baik)

2. IKHTISAR HASIL EVALUASI OLEH INSPEKTORAT TERHADAP LKJIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Pada tahun 2023, hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Inspektorat terhadap LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Komponen	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja		
1	Agar melampirkan formula perhitungan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan dan menetapkan Indikator Kinerja Tujuan yang dapat dicapai.	Telah mencantumkan formula perhitungan indikator kinerja dalam dokumen manual IKU 2023
Pengukuran Kinerja		
1	Agar membuat Manual IKU yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022	Telah membuat manual IKU disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022
2	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian tambahan/pengurangan Tunjangan Kinerja	Telah dibuat perjanjian kinerja dari level eselon sampai dengan tingkat staf sebagai dasar perhitungan kinerja
3	Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam mencapai kinerja	Penbuatan perjanjian kinerja antar level sfat dengan eselon telah sesuai dengan matrik peran hasil sehingga mendukung pencapaian kinerja
Pelaporan Kinerja		
1	Memperbaiki kualitas informasi yang ada pada Laporan Kinerja sehingga menampilkan data serta gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara menyeluruh dan akurat. Meminimalisir kesalahan penulisan dalam Laporan Kinerja.	Telah diperbaiki dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2024

2	Melampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya secara detail.	Telah disusun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya secara detail dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2024
3	Melampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam dokumen laporan kinerja.	Telah menyusun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun setara OPD (Benchmark Kinerja) dalam dokumen laporan kinerja
4	Menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk masing-masing indikator.	Telah menyusun faktor pendukung dan hambatan serta upaya pada masing-masing indikator kinerja
5	Agar menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Telah menyusun upaya dan langkah-langkah guna perbaikan kinerja yang akan datang
6	Agar mencantumkan informasi terkait perubahan budaya kinerja organisasi pada Laporan Kinerja	Telah menyusun upaya dan langkah-langkah guna perbaikan kinerja yang akan datang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, bilamana terdapat deviasi pencapaian target saat pelaksanaan monitoring triwulan yang tertuang pada Laporan Monitoring Triwulan atas Rencana Aksi.	Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan menyusun rekomendasi dan saran tindak pada setiap indikator kegiatan yang belum sesuai
2	Melaksanakan rapat pemantauan kinerja secara berkala dan mengarsipkan secara tertib terkait data dukung pelaksanaan rapat.	Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan menyusun rekomendasi dan saran tindak pada setiap indikator kegiatan yang belum sesuai

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 06 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Dasar Pengukuran IKU

1. Pengukuran IKU dierdasarkan cakupan, kriteria dan batasan yang dituangkan dalam manual IKU review Tahun 2023. Data dasar pengukuran ketercapain masing-masing indikator yaitu **jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yang berhak mendapatkan layanan kebencanaan yakni sebanyak 17.142 warga**. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah warga yang berada dikawasan rawan bencana yaitu bencana banjir sebagai tolok ukurnya. Sebaran daerah yang terdampak banjir di kota bontang yakni sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan. Data yang diambil yaitu data jumlah penduduk di 10 (sepuluh) kelurahan pada tahun 2021 sebanyak 85.710 jiwa (sumber disdukcapil 2021). Jumlah penduduk tersebut yang dijadikan target renstra selam 5 (lima) tahun, sehingga per tahun didapat angka sebanyak 85.710 jiwa / 5 tahun sebanyak 17.142 jiwa per tahunnya.
2. Rumus penghitungan ketercapaian IKU berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu jumlah warga negara yang mendapat layanan kebencanaan dibagi jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yang berhak mendapatkan layanan kebencanaan dikali 100 %.

$$\left(\frac{X}{Y} \right) \times 100 \%$$

Ket: X = jumlah warga negara yang mendapat layanan kebencanaan

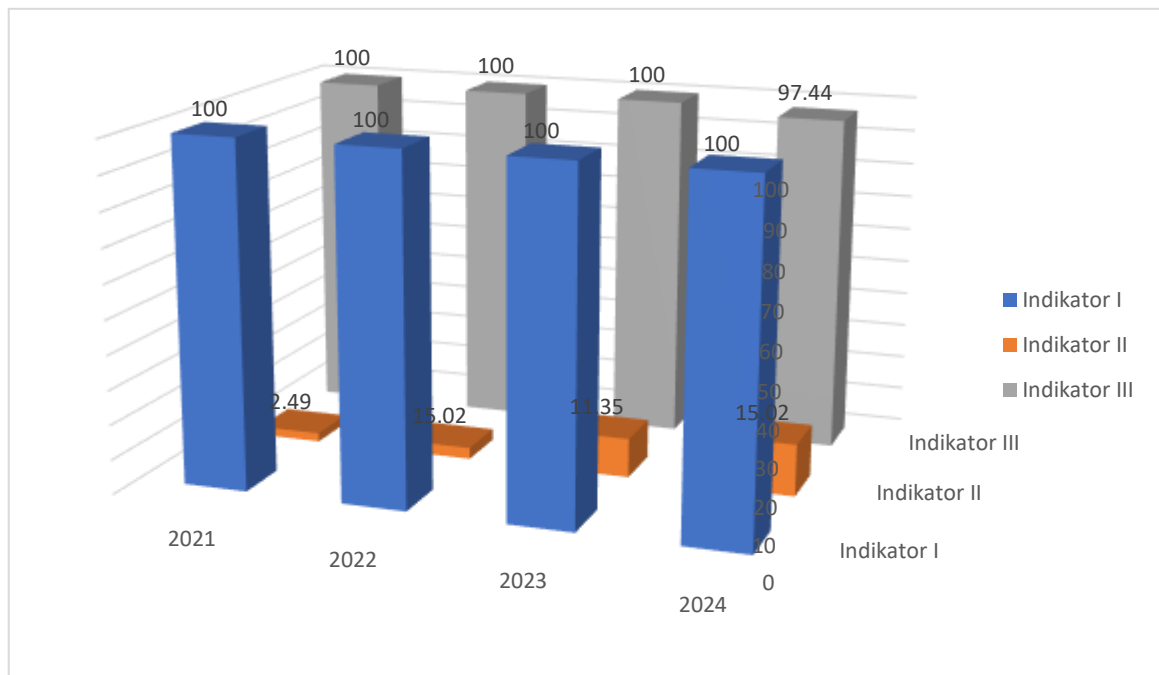
Y = jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yang berhak mendapatkan layanan kebencanaan

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Angka (Jml Warga)		Prersentase (%)		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator I)	17.142	17.142	100	100	Tercapai sesuai target 100 %
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Indikator II)	17.142	2.751	15	15.02	Tercapai sesuai target 15%
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi (Indikator III)	39	38	100	97.44	Tercapai 100%

Grafik ..Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024



Berdasarkan Tabel 3.3 dan grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

B.1.1 Pencapaian Indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator I)

Pada indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pelayanan warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan sasaran warga yang berada di daerah rawan bencana Kota Bontang.

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Angka (Jml Warga)		Prersentase (%)		Capaian %
			Target	Realisasi	Targ et	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Terwujudnya Responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator I)	17.142	17.142	100	100	Tercapai sesuai target 100 %
---	--	---	--------	--------	-----	-----	------------------------------

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target indikator I sebanyak 17.142 orang target tersebut merupakan target yang tertuang dalam SPM sub urusan penanggulangan bencana. Target tersebut dapat dicapai melalui pencapaian kinerja pada Sub Kegiatan Sosialisasi Edukasi dengan target yaitu 17.142 orang. Jumlah tersebut adalah target tahunan yang tertuang dalam rencana strategis. Angka diperoleh dari jumlah warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana yang berada diwilayah rawan bencana pada tahun 2021 sebanyak 10 kelurahan yang terdampak bencana dengan jumlah penduduk 85.710, sehingga Jumlah tersebut menjadi target pelayanan penanggulangan bencana yang dicantumkan dalam dokumen standar pelayanan minimal. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi target tahunan selama 5 tahun di dapat target jumlah penduduk yang memperoleh layanan penanggulangan bencana sebesar 17.142 orang.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target indikator I menunjukkan bahwa pencapaian target mendapat angka 100% yaitu perbandingan antara target dan realisasi dikalikan 100%. Untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan sub kegiatan tersebut dilakukan beberapa pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan

dokumen Kajian Risiko Bencana

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) saat ini telah disusun dan disahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan identifikasi dan pemetaan di wilayah kelurahan Api - api. Identifikasi dan pemetaan ini dilakukan terhadap warga rentan, yaitu : warga usia 60+, disabilitas, dan memiliki keterbatasan (tidak mampu membawa diri).

- c. Melakukan sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

Kegiatan tatap muka dilakukan melalui kegiatan sosialisasi / penyuluhan yang di inisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- Sosialisasi dengan tatap muka dengan peserta sebanyak : 2.508 orang.
- Sosialisasi menggunakan media online yaitu digitalpos.com.
- Sosialisasi melalui videotron.

- d. Sosialisasi menggunakan sosial media Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain ; Instagram, Facebook dan What's App Group kebencanaan (WA Grup KELANA seluruh Rt di Kota Bontang). Dengan adanya wa group kelana yang beranggotakan per orang tiap Rt sehingga dari anggota group kelana meneruskan ke tiap warga RT sehingga seluruh warga yang memiliki wa group warga mendapat informasi tentang informasi kebencanaan. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) per jenis bencana Rambu evakuasi dan titik kumpul yang disediakan atas dasar supervisi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terdapat 9 titik kumpul yang ada di Kota Bontang.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	17.142	17.142	100 %	17.142	17.142	100%	17.142	17.142	100%

Pada tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan angka capaian 100% artinya bahwa target 17.142 warga negara yang berhak mendapatkan layanan informasi rawan bencana (warga yang berada di kawasan rawan bencana) pada setiap tahunnya dapat tercapai atau mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana dengan prosentase 100 % tercapai.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Target Restra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan dibandingkan dengan dokumen renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

Perbandingan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun			Tingkat Kemajuan
				2022	2023	2024	
1	2	4	5		6		7
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Tetap

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang telah Dilakukan

Analisa keberhasilan pencapaian persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian diperoleh dari kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan melaksanakan:

- Sub Kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Per Jenis Bencana).
- Sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan dengan adanya pembentukan relawan kelurahan tangguh bencana. Relawan tangguh bencana sejumlah 15 kelurahan dengan anggotanya 1 orang tiap RT, hal ini menjadi ujung tombak kegiatan penganggulangan bencana berbasis wilayah terkecil, mulai dari penyebarluasan informasi kebencanaan maupun pelaksanaan penanganan bencana secara dini.
- Kerjasama multi pihak antara lain melibatkan pihak sekolah, perusahaan / badan usaha, media dan masyarakat.

Untuk mencapai target kinerja pada indikator ini tentu mendapatkan hambatan/permasalahan yang dihadapi. Adapaun hambatannya yaitu sebagai berikut:

- a) Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media langsung, sosial media maupun media lainnya.
- b) Belum maksimalnya pengelolaan data ketercapaian pelaksanaan penyampaian informasi.
- c) Belum maksimalnya pemasangan rambu-rambu informasi kebencanaan.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang mengelola penyampaian informasi kebencanaan.
- b) Memaksimalkan potensi dan kerja sama antar media dalam menyampaikan informasi kebencanaan.
- c) Menambah pemasangan rambu-rambu papan informasi dan media elektronik lainnya.
- d) Menambah dukungan terhadap pelaksanaan sosialisai edukasi dan komunikasi rawan bencana.
- e) Melaksanakan pengukuran keberhasilan penyebaran informasi secara komperhensif dan terukur.

5. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 6 Efisien Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4			
Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	17.142	17.142	100%	1,009,998,431	913,817,500	90.48%

Tingkat Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,00 % dengan Persentase Capaian Anggaran sebesar 90.48 %. sehingga didapat Persentase Tingkat Efisiensi sebesar 9.52 % hal ini menggambarkan telah terjadi efektifitas penggunaan sumber daya dan efisiensi anggaran yang ada.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Analisis Dukungan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	434,837,500

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	478,980,000
--	--	--	-------------

Pada tabel dukungan anggaran diatas dapat dijelaskan bahwa pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota didukung dua sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan kajian resiko bencana telah dilaksanakan dengan out put dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Bontang.
2. Pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) melalui:
 - a. Sosilaisasi tatap muka tentang kedaruratan di air dan kedaruratan/kebencanaan di darat sebanyak 230 orang yang dilaksanakan di hotel Tiara Surya.
 - b. Sosialiasai melalui media online yaitu melalui laman digitalpos,com sebanyak 117 kali tayang dengan grade A.
 - c. Sewa video tron untuk menayangkan informasi kebencanaan, penayangan selama 3 bulan.
 - d. Sosialisasi menggunakan media sosial tidak menggunakan dukungan anggaran pada tahun 2024.

Dokumentasi Sosialisasi



B.1.2 Pencapaian Indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Indikator II)

Pencapaian indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3. 8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Angka (Jml Warga)		Prersentase (%)		Capaian
			Target	Realisasi	Targ et	Realisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Responsifitas yang terukur,cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.142 orang (Indikator II)	2.571	2.571	15	15.02	Tercapai 100 % sesuai target

Pengukuran indikator II yaitu persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan capaian kinerja 15.02%. Indikator dicapai melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Dari sub kegiatan pelatihan didapat angka 2.571 orang melalui kegiatan pelatihan sebagai berikut:

Lampiran IV

**REKAPITULASI JUMLAH PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN / SIMULASI KEBENCANAAN
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL	MATERI SOSIALISASI	TEMPAT KEGIATAN	PESERTA	JUMLAH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Jum'at, 02 Februari 2024	Pelatihan Kebencanaan		KELANA	175	08.00 WITA - Selesai	External
2	23 Mei 2024	Workshop Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM)	Hotel Grand Mutiara Bontang	GURU PAUD, TK, SD, SKB/PKBM, SMP, SMA/SMK SEKOTA BONTANG	240	13.00 WITA - Selesai	External
3	08 Juni 2024	Pelatihan Kepada Anggota Saka Bahari Bontang	Pos TNI AL Bontang	Anggota Saka Bahari	39	08.00 WITA - Selesai	External
4	28 Juni 2024	Sosialisasi Kebencanaan dan Simulasi Evakuasi	KPKNL Bontang	Pegawai KPKNL	30	08.00 WITA - Selesai	External
5	Kamis, 04 Juli 2024	Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana	Lembaga Permayarakatan Kelas II A Bontang	Narapidana Lapas Kelas IIA Bontang	40	08.00 WITA - Selesai	External
6	Senin, 16 Juli 2024	Sosialisasi Kebencanaan dan Simulasi Evakuasi	SD Negeri 003 Bontang Selatan	Guru, Murid dan Orang tua Murid	354	08.00 WITA - Selesai	External
7	Jumat, 19 Juli 2024	Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana	SD Negeri 002 Bontang Barat	Guru dan Peserta Didik	254	08.00 WITA - Selesai	External
8	Kamis, 25 Juli 2024	MPLS Kelas 1 (Sosialisasi Penanggulangan Bencana)	SD Negeri 005 Bontang Utara	Guru dan Peserta Didik	91	08.00 WITA - Selesai	External
9	Kamis, 8 Agustus 2024	Pelatihan Rapling (PASGARDA)	Kampus DHBS Putri	Pramuka DHBS	16	13.30 WITA - Selesai	External
10	Selasa, 13 Agustus 2024	Mitigasi Bencana	TK ALAM Baiturrahman	Guru dan Murid TK Alam Baiturrahman	135	08.00 WITA - Selesai	External
11	17 Agustus 2024	Sosialisasi di perkemahan Wirakarya Daerah Kalimantan Timur 2024	Bumi Perkemahan Taman Pramuka Bontang Lestari	Masyarakat	131	13.30 WITA - Selesai	External
12	Senin, 02 September 2024	Latihan Dasar Disiplin Korps (LDDK)	SMKN 2 Bontang	Kelas X	285	08.00 WITA - Selesai	External
13	Rabu, 25 September 2024	Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	SDN 002 Bontang Utara	Guru dan Siswa - siswi SDN 002 Bontang Utara	100	08.00 WITA - Selesai	External
14	Sabtu, 05 Oktober 2024	Pelatihan dan Simulasi Hoght Angle Rescue SD Vidatra Kelas 3B	Halaman Kantor BPBD Kota Bontang	Guru dan Peserta Didik	27	08.00 WITA - Selesai	External
15	Senin, 21 Oktober 2024	Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Darurat Kebencanaan	Kantor PT.Pelindo Regional IV Bontang	Karyawan/ti	16	13.00 WITA sd. Selesai	External
16	Senin, 28 Oktober 2024	Sosialisasi Kebencanaan dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	SMA N 1 Bontang	Siswa/i	205	08.00 WITA - Selesai	External
17	Rabu, 30 Oktober 2024	Sosialisasi Kebencanaan dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	SMA N 3 Bontang	Siswa/i	213	08.00 WITA - Selesai	External
18	Kamis, 31 Oktober 2024	Pelatihan Water Rescue	Pulau Beras Basah	Relindo (Relawan Indonesia)	20	08.00 WITA - Selesai	External
19	Jum'at, 01 November 2024	Sosialisasi Kebencanaan	SMA N 1 Bontang	Siswa/i	204	08.00 WITA - Selesai	External
Jumlah Peserta					2575		

Bontang, 10 Januari 2025
Kepala Pelaksana,

H. Usman HM, ST, M.Si
Pemula Tk. I / IV b
NIP. 19670615 200312 1 004

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja	Realisasi								
		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	17.142	655	3.82%	17.142	1.945	11.35%	2.570	2.575	100%

Pada indikator II, dapat dilihat adanya tren yang meningkat dari tahun ketahun pada tahun 2022 mendapat pengukuran sebanyak 3.82% yakni jumlah warga yang terlayani sebanyak 655 orang, pada tahun 2023 mendapat pengukuran sebanyak 11.35% yakni jumlah warga yang terlayani sebanyak 1.945 orang sedangkan pada tahun 2024 sebesar 100% yakni jumlah warga yang terlayani sebanyak 2.575 orang dari target 2.750 orang hal ini adanya peningkatan yang signifikan yang disebabkan adanya dukungan anggaran internal dan adanya dukungan peihak external untuk kegiatan pelatihan dan mitigasi bencana.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Target Restra

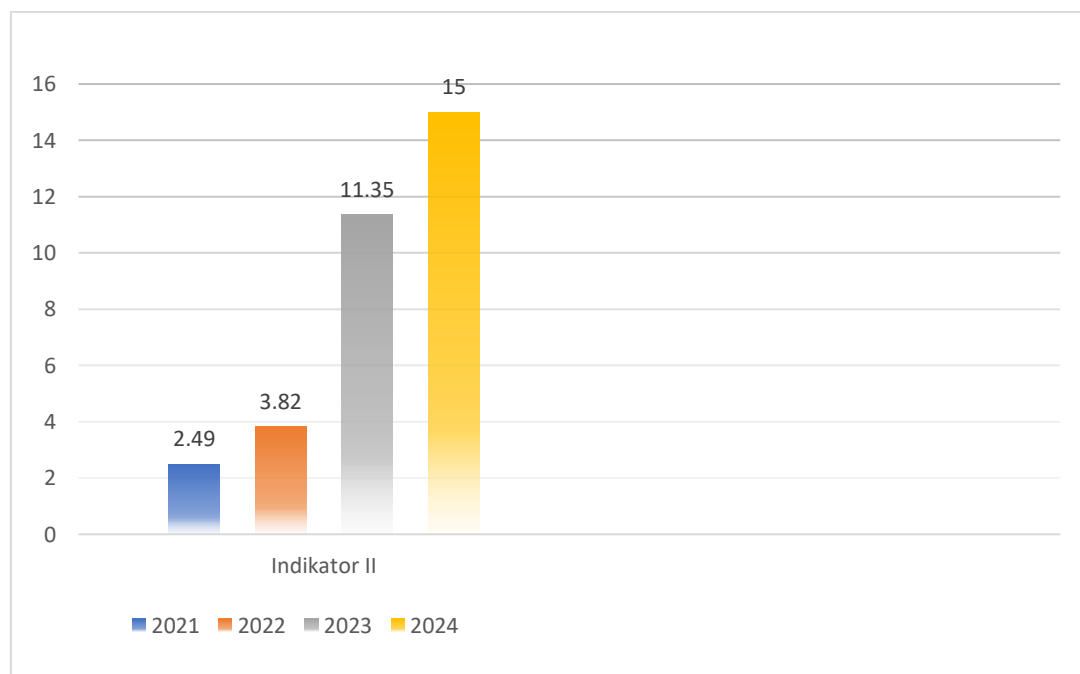
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan dibandingkan dengan dokumen renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

Perbandingan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun				Tingkat Kemajuan
				2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	100	2.49	3.82	11.35	15.00	Meningkat

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target tahunan masih jauh dari harapan walaupun pada tiap tahun adanya peningkatan. Hal ini disebabkan belum secara menyeluruh sub kegiatan maupun pendataan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan pihak eksternal berjalan dengan baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang telah Dilakukan

Analisa keberhasilan/kegagalan pada indikator II yakni sebagai berikut:

Keberhasilan :

1. Pelaksanaan Pelatihan yang berjalan dengan baik yang dilaksanakan pihak internal dan eksternal.
2. Pihak internal melaksanakan pelatihan kepada masyarakat dan sekolah.
3. Adanya pelatihan pihak eksternal : sekolah, perusahaan dan relawan lainnya.

Beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

1. Ada beberapa sub kegiatan belum menjadi tolok ukur kinerja pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota. Diantaranya sub kegiatan penguatan kawasan rawan bencana dengan rincian kegiatan antara lain pemantauan atau patroli daerah rawan tingkat RT, pemantauan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, dan pemantauan daerah wisata laut dan pesisir dan inspeksi sekolah dan rumah ibadah.
2. Ada pelaksanaan kegiatan galdi lapangan, pengamanan acara dan lainnya yang belum terakomodir dalam perhitungan pengukuran kinerja.
3. Belum mendalam proses pendataan kegiatan internal maupun eksternal yng mendukung jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
4. Pelaksanaan sub kegiatan pada rincian objek kegitan yang belum terlaksana sesuai target.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja adalah:

1. Pendataan secara mendalam terkait pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan internal, eksternal maupun kegiatan fasilitasi.
2. Menjalin kolaborasi dan sinergitas bersama pihak-pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan maupun simulasi kebencanaan.
3. Menambah dukungan anggaran pada kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya petugas BPBD.
5. Meningkatkan koordinasi kepada semua pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

5. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 11 Efisien Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Terget	Realisasi	Capaian %	Terget	Realisasi	Capaian %
Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.570	2.575	100 %	1,586,278,164	1,371,177,085	86.44%

Tingkat Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,00 % dengan Persentase Capaian Anggaran sebesar 86.44%. sehingga didapat Persentase Tingkat Efisiensi sebesar 13.56 %, namun hal ini menggambarkan adanya penyerapan yang tidak sempurna pada anggaran kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kab/kota yaitu adanya rincian objek pekerjaan yang tidak terlaksana pada sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan sebesar 63.779.865.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Analisis Dukungan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1,188,278,000	98.65 %
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	142,413,250	78.93 %
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	53,348,235	51.58 %
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	112,679,269	100 %
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	89,559,410	100 %

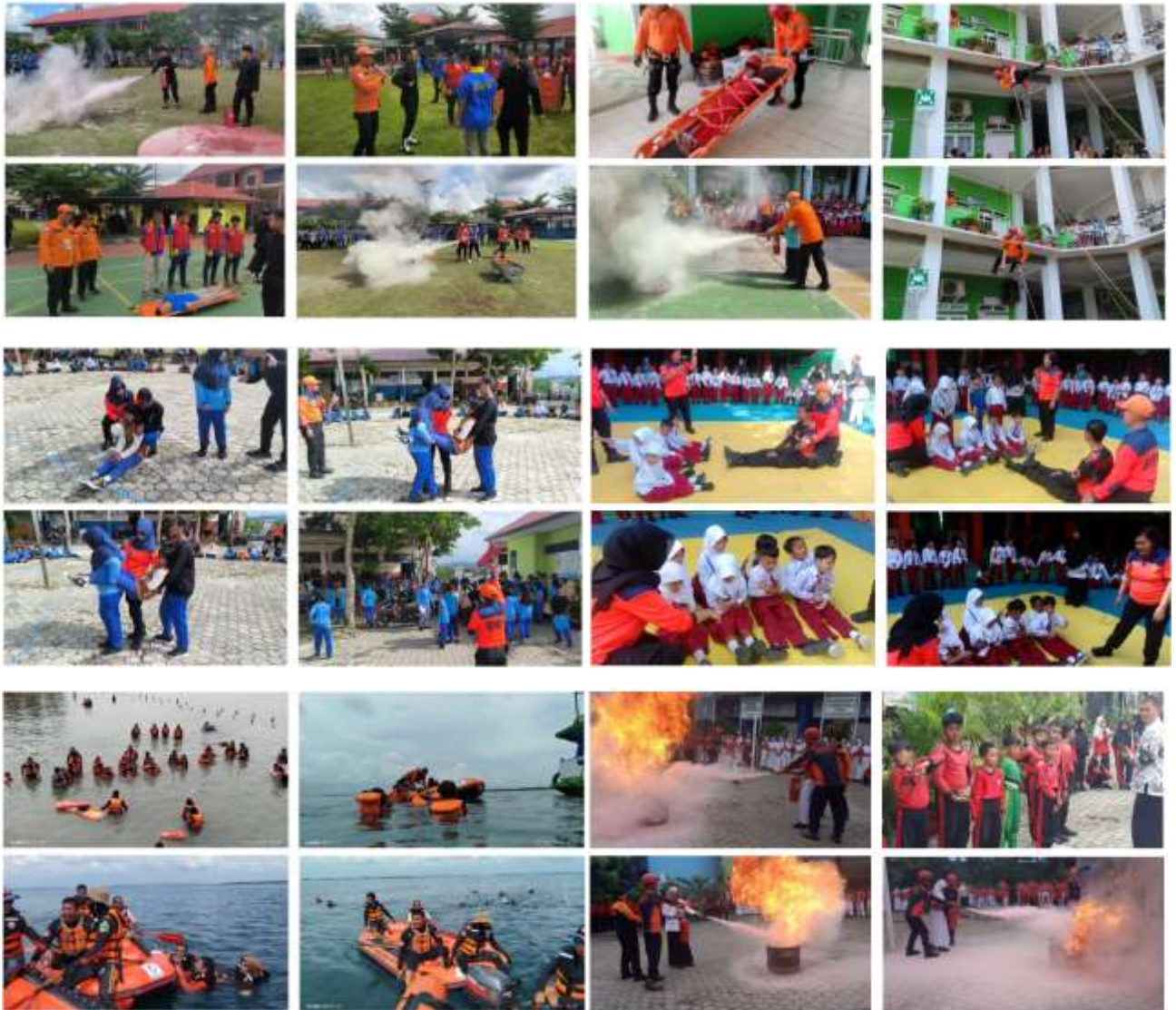
Dalam mendukung tercapainya indikator II yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana seperti yang tertuang Pada tabel dukungan anggaran diatas terdapat lima sub kegiatan. Terlihat ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana 100 % antara lain :

1. Sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terlaksana 78. 93%, pada sub kegiatan ini rincian objeknya yakni pelaksanaan pemantaun daerah rawan RT,

pemantauan wisata laut, pemantauan wilayah karhutla dan inspeksi. Dari semua rincian tersebut terlaksana namun pada saat perubahan anggaran adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan tersebut namun secara administrasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan proses pelaksanaan dokumen pengadaan barang dan jasa mengalami kendala.

2. Sub kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana terlaksana 51.58%. Pada sub kegiatan ini memiliki rincian obyek gladi bersama stekholder terkait penanggulangan bencana, pelaksanaan tidak mencapai 100% dikarenakan pada anggaran perubahan akan dilaksanakan namun stekholder terkait tidak dapat mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga hanya terlaksana pada semester pertama.

Dokumentasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana



B.1.3. Pencapaian Indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi (Indikator III)

Pencapaian indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3. 13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Angka (Jml Warga)		Persentase (%)		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi (Indikator III)	39	38	100	97.44	Mencapai Target

Indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi dengan capaian kinerja 97.44 %. Pengukuran tersebut dapat terealisasi melalui kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota melalui penanganan korban bencana Jumlah korban kejadian bencana yang di tangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebanyak 39 korban dengan rincian 37 korban yang terdampak dan selamat, 1 (satu) orang korban meninggal dunia, dan 1 (satu) orang korban hilang:

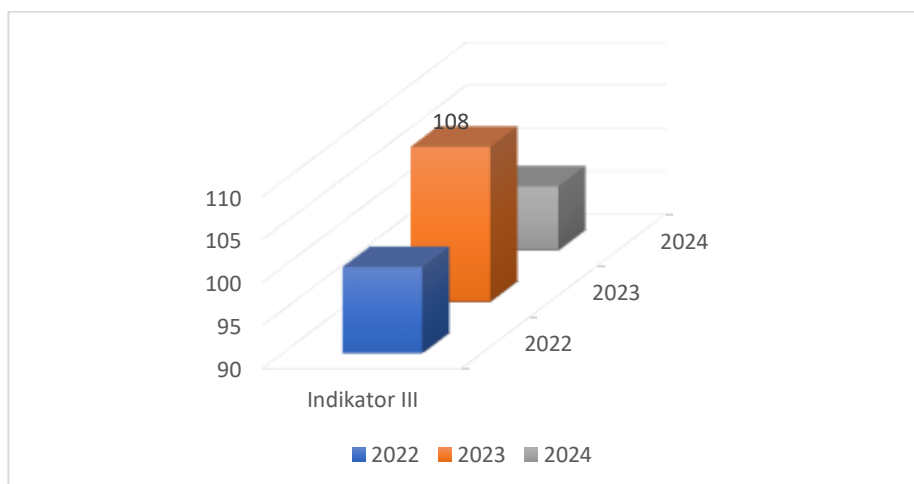
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu ataupun beberapa tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Namun dengan dilakukannya reviu pada rencana strategis dan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2023, maka perbandingan capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Terget	Realisasi	Capaian	Terget	Realisasi	Capaian	Terget	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi	216	216	100%	120	130	108%	39	38	97.44 %

Grafik Realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi



Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat dijelaskan sebagai berikut:

Pada indikator III perbandingan antara tahun 2022 yaitu tercapai 100% dan pada tahun 2023 tercapai 108%, pada tahun 2024 sebesar 97.44 %. Pada tahun 2022 target dan realisasi kinerja sesuai, namun pada tahun 2023 relaisasi kinerja melebihi target yang ditentukan dalam renja perubahan 2023 hal ini terjadi karena kejadian bencana tidak dapat diprediksi dan penentuan target hanya melalui asumsi dan kejadian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 jumlah korban bencana sebanyak 39 orang dan 1 orang yang dinyatakan hilang.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

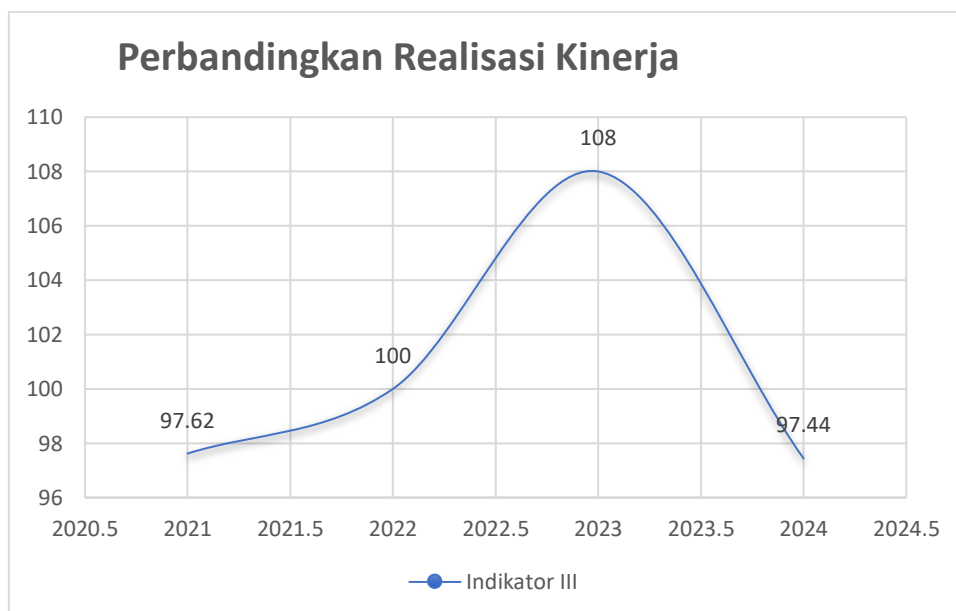
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan dibandingkan dengan dokumen renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

Perbandingan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun				Tingkat Kemajuan
				2021	2022	2023	2024	
1	2	4	5		6		7	8
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	97.62	100	108	97.44	Sesuai Target

Grafik ... Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target jangka Menengah Indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



Pada indikator ini apabila dibandingkan dengan target renstra maka data dari tahun 2021 dengan angka ketercapaian sebesar 97.62%, tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 108% dan tahun 2024 sebesar 97.44 %. Dapat disimpulkan bahwa adanya korban yang hilang dilaut mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan indikator III yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang telah Dilakukan

Pengukuran Capaian kinerja didasarkan pada rencana kerja tahun 2024 dengan target renstra yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Indikator III “Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi” dengan capaian kinerja 97.44 %. Pengukuran indikator tersebut tercapai melalui pelaksanaan pada sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Dalam menentukan target pengukuran didasarkan pada asumsi kejadian tahun-tahun sebelumnya yaitu sejumlah korban bencana pada tahun berjalan.

Hambatan yang dialami dalam mencapai indikator Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya deviasi dalam penentuan target kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang bersifat penanganan bencana yang tidak dapat diperkirakan kapan dan jumlah kejadiannya.
2. Kendala teknis penanganan yang bersifat karakteristik penyelamatan dan efakuasi didarat maupun di air/laut.
3. Kesiapsiagaan sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja adalah:

1. Dalam menentukan target kinerja berpedoman pada asumsi dari jumlah kejadian tahun-tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan kapasitas, kewaspadaan, serta perhitungan berdasarkan disiplin ilmunya bagi sumber daya tenaga teknis.

3. Memastikan setiap sarana pendukung penanggulangan sedia setiap saat.
4. Menjalin silaturahmi dan koordinasi secara periodik ataupun diadakan roll call di masing-masing nomor darurat pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
5. Dukungan dan penanganan yang memadai dan tepat sasaran.
6. Memaksimalkan call center 112 guna pelaporan secara cepat.
7. Menyusun SOP bidang kedaruratan dan Logistik

5. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 16 Efisien Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100	97.44	100%	176,743,285	118,458,000	67.02%

Tingkat Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,00 % dengan Persentase Capaian Anggaran sebesar 67.02%. sehingga didapat Persentase Tingkat Efisiensi sebesar 32.98 % hal ini menggambarkan telah terjadi efektifitas penggunaan sumber daya dan efisiensi anggaran yang ada. Hal ini di karenakan adanya perubahan pola penanganan kejadian bencana yang semula setiap ada kejadian bencana seluruh petugas turun kelapangan namun pada tahun 2024 dibuat skala tingkatan kejadian bencana, ketika kejadiannya skala 1 maka petugas difokuskan kepada petugas atau tim yang berjaga pada saat itu, pada saat skala 2 maka petugas pengganti ikut turun membantu dan ketika skala 3 maka seluruh tim atau petugas turun bertugas semua. Sehingga adanya efisiensi pada sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dibutuhkan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 17 Pagu dan Realisasi Program Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	132,780,860.00	100 %
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43,962,425.00	100 %

Analisa Program Penanggulangan Bencana yang menunjang capaian indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dalam sub kegiatan ini yakni penyediaan logistik makan dan minum serta natura bagi petugas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Seperti yang sdh di jelaskan dalam analisa efisiensi sumberdaya diatas adalah sebagai wujud pengelolaan efisiensi sumberdaya yang baik. Adapun kegiatan penanganan bencana terekap sebagai berikut:

Total Kejadian Bencana Tahun 2024

1 Tanah Longsor	: 1 Kejadian	
2 Kebakaran Lainnya (Korsleting Listrik, Limbah CPO, Tumpukan Sampah)	: 3 Kejadian	
3 KARHUTLA	: 40 Kejadian	(151,6671 Ha)
4 Kebakaran Pemukiman	: 14 Kejadian	
5 Lainnya	: 5 Kejadian	
6 Banjir	: 3 Kejadian	



2. Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan ini yaitu melaksanakan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi



1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional/Sejenis (Branchmarking)

a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), BPBD Kota Yogyakarta bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kota Bontang. Berdasarkan hasil pengukuran e-SPM Sub Urusan Bencana, pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kota Bontang telah mencapai Tuntas Paripurna.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2024
(sumber data: E-SPM Kemendagri 2024)

[illegible]

b. Perbandingan Evaluasi Kinerja dengan OPD BPBD lain yang setara

Untuk mengukur perbandingan kinerja BPBD Kota Bontang dengan BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan pengukuran indeks ketahanan daerah (IKD) yang ditetapkan oleh BNPB dengan tujuh (7) prioritas pengukuran dan tujuh puluh satu (71) indikator kunci dengan hasil nilai sebagai berikut:

**Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Paser	0.35	187.98
Kutai Barat	0.30	151.32
Kutai Kartanegara	0.52	118.80
Kutai Timur	0.42	173.36
Berau	0.72	148.64
Penajam Paser Utara	0.43	131.81
Mahakam Ulu	0.41	146.03
Kota Balikpapan	0.82	101.43
Kota Samarinda	0.80	85.20
Kota Bontang	0.54	116.57

(sumber data: surat BNPB no. B-06.23/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025)

Dari tabel diatas menunjukan bahwa Kota Bontang masih berada dibawah dua Kota di Kalimantan Timur yang artinya masih perlu

peningkatan diberbagai sektor. Dapat dilihat dalam matrik hasil penilaian sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.83
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.53
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.60
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.81
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.90
	Gempabumi	-
	Tsunami	-
	Banjir	0.80
	Banjir Bandang	-
	Tanah Longsor	0.10
	Letusan Gunungapi	-
	Kebakaran Hutan & Lahan	-
	Kekeringan	-
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.29
	Gempabumi	-
	Tsunami	-
	Banjir	0.10
	Banjir Bandang	-
	Tanah Longsor	0.03
	Letusan Gunungapi	-
	Kebakaran Hutan & Lahan	0.03
	Kekeringan	-
	Indikator Generik	0.12
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.25

(sumber data: verifikasi BNPB hasil nilai IKD Kota Bontang Th 2024)

Dari data hasil verifikasi diatas menunjukkan sebagian besar prioritas masih memiliki nilai di bawah 0.5 hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus terhadap peningkatan prioritas-prioritas penanggulangan bencana yang masih rendah karena IKD merupakan tolok ukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana diwilayahnya, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap nilai Indeks Resiko Bencana di wilayah setempat.

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 12,931,970,812,-** realisasi anggaran mencapai **Rp.**



12,090,512,580,- sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sehingga menjadi SILPA sebesar **Rp. 841.458.232,-**

Berikut realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA BONTANG										
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN										
TAHUN ANGGARAN 2024										
Organisasi	: 1.05.07.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
Periode	: 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024									
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	519,106,400,00	519.106.400,00	100	434,837,500	83.77	100	100	84.268.900,00	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	490,892,031,00	490.892.031,00	100	478,980,000	97.57	100	100%	11.912.031,00	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	142,413,250,00	142.413.250,00	100	78,633,385	55.21	100	78.93	63.779.865,00	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	53,348,235,00	53.348.235,00	100	18,610,000	34.88	100	51.58	34.738.235,00	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	112,679,269,00	112.679.269,00	100	85,680,000	76.04	100	76.93	26.999.269,00	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,188,278,000,00	1.188.278.000,00	100	1,115,182,200	93.85	100	98.65	73.095.800,00	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	89,559,410	89.559.410,00	100	73,071,500	82	100	100%	16.487.910,00	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	132,780,860,00	132.780.860,00	100	75,040,000	56.51	100	100	57.740.860,00	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	43,962,425,00	43.962.425,00	100	43,418,000	98.76	100	100	544.425,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,055,764,00	6.055.764,00	100	6,000,000	99.08	100	100	55.764,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,911,482,505,00	6.911.482.505,00	100	6,804,360,719	98.45	100	100	107.121.786,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383,598,202,00	383.598.202,00	100	362,495,000	94.5	100	99.82	21.103.202,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,186,942,00	9.186.942,00	100	8,556,000	93.13	100	94.31	630.942,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133,882,525,00	133.882.525,00	100	112,089,300	83.72	100	98.95	21.793.225,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133,018,893,00	133.018.893,00	100	120,485,000	90.58	100	99.49	12.533.893,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,548,634,00	96.548.634,00	100	92,574,000	95.88	100	97.17	3.974.634,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	832,879,938,00	832.879.938,00	100	822,535,302	98.76	100	100	10.344.636,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,350,000,00	37.350.000,00	100	33,010,000	88.38	100	98.18	4.340.000,00	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,424,081,00	59.424.081,00	100	56,090,000	94.39	100	100	3.334.081,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,100,000,00	6.100.000,00	100	6,100,000	100	100	100	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,400,000,00	146.400.000,00	100	113,214,801	77.33	100	100	33.185.199,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285,389,374,00	285.389.374,00	100	264,093,954	92.54	100	100	21.295.420,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895,840,774,00	895.840.774,00	100	666,314,520	74.38	100	99.46	229.526.254,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,793,300,00	221.793.300,00	100	219,141,399	98.8	100	100	2.651.901,00	
TOTAL RKA (24)		12,931,970,812,00	12,931,970,812,00	100	12,090,512,580	93.49	100	99.15	841.458.232,00	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dari keseluruhan 4 (Empat) sasaran, pada umumnya telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2024. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah sangat ditentukan oleh komitmen, partisipasi dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana dan bencana adalah tanggung jawab bersama.

Keberhasilan yang dicapai bukan berarti tanpa permasalahan. Problematika permasalahan dibidang penanggulangan bencana merupakan tantangan bagi BPBD Kota Bontang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat, propinsi, OPD terkait, perusahaan, relawan dan masyarakat akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, media, maupun dunia usaha.
2. Penyusunan dokumen kebencanaan secara lengkap yang selaras dengan dokumen kajian resiko bencana meliputi dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana kontigensi tiap jenis bencana, rencana aksi dan penyusunan rencana kedaruratan bencana yang sejalan dan terpadu dengan perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan.
3. Penyusunan SOP kebencanaan secara lengkap dan terpadu antara lain SOP pada saat pra bencana, tanggap bencana dan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagai wadah dan penguatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama.
5. Melaksanakan terobosan dan inovasi agar pelaksanaan program kerja yang sudah di rencanakan di dalam dokumen perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan di SKPD pada tahun mendatang.
3. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur penanggulangan bencana baik struktural dan fungsional.
4. Meningkatkan partisipasi dan dukungan dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam antisipasi dan penanggulangan bencana.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sampai dengan tahun anggaran 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang akan menggunakan laporan kinerja ini dalam rangka perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja untuk melaksanakan review indikator kinerja BPBD Kota Bontang pada tahun 2025 agar lebih efektif, efisiensi, dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana.